

BAB IV

SELAMATKAN DEMOKRASI KITA

A. Kesimpulan

Konsepsi pemikiran Hatta baik itu mengenai demokrasi, kebangsaan, dan HAM satu sama lain saling terkait dan saling bersinergi antara satu dengan yang lain. Secara fundamental konsep demokrasi yang sehat adalah proses hubungan transformatif antara negara dan rakyatnya. Demokrasi dapat dikatakan berjalan bila gerakan rakyat ikut dalam mengubah relasi dan posisi relatifnya terhadap negara. Adanya proses demokrasi politik di Indonesia tidak akan mengantarkan Indonesia pada kematangan demokrasi. Berbeda bila proses demokrasi dalam arti kedaulatan rakyat digiatkan untuk membuat demokrasi yang sebenarnya. Berhubungan dengan pengaturan lokal yang beragam, diperlukan pemetaan lokal.

Yang sebenarnya demokrasi yang berkedaulatan rakyat sudah berlangsung, namun demokrasi yang sifatnya ini cenderung disingkirkan oleh mayoritas yang dominan. Di perlukan adanya nilai dan norma demokrasi yang berangkat dalam konteks pengertian demokrasi yang sebenarnya melalui peleburan yang memungkinkan aktualisasinya lebih bersifat sistematis. Formula semacam ini relevan dengan apa yang dahulu Hatta gagas dalam konteks pemikiran demokrasinya, yaitu proses

kedaulatan rakyat. Kedaulatan rakyat yaitu prinsip dengan menghendaki rakyat yang mempunyai kesadaran atau keinsafan politik yang timbul beserta rasa tanggung jawab yang menjadi tombak dari pemerintahan rakyat, maka diperlukan sebuah didikan politik bagi rakyat. Persoalan mengenai keinsafan politik ini harus mesti hadir dari kedua pihak yaitu antara pemerintah dan masyarakat mempunyai kehendak yang sama akan adanya keinsafan politik. Di samping pemerintah memudahkan jalan pendidikan politik melalui pelatihan yang disadarkan pada kepentingan dan pembangunan masyarakat, usaha didikan politik dari partai politik sangat berperan.

Mengenai Kebangsaan atau nasionalisme pemerintah yang berkuasa harus berjalan dengan kemauan rakyat atau pemimpin negara yang berdasar pada permusyawaratan rakyat atau kebangsaan cap rakyat, memanglah permusyawaratan dengan mengadu keyakinan banyak memakan waktu. Walau bagaimanapun permusyawaratan dengan jalan saling menghargai masing-masing membentuk dan memerdalam keyakinan demi tertujunya masyarakat madani. Dengan demikian rakyat yang sudah memiliki keinsafan politik hanya ingin dipimpin oleh pemimpin yang meyakinkan. Keberadaan nasionalisme harus dimunculkan kembali untuk melawan para kaum oligarki dan kaum kapitalis buah dari liberalisme yang merampas negeri ini, menjadikan nasionalisme sebagai agenda bersama menjaga perkembangan bangsa dan untuk kemakmuran rakyat. Kehidupan masyarakat madani atau kebangsaan cap rakyat inilah yang kemudian

mampu mengakomodir segala hajat kehidupan masyarakat, melalui kedaulatan rakyat dan jaminan HAM.

Berkaitan dengan HAM Indonesia sebagai negara hukum harus kembali pada konstitusi yang berjalan, peraturan demi peraturan harus ditegakkan bukan hanya sekedar formalitas dalam sebuah undang-undang. Diperlukan keselarasan baik dalam segi normatif maupun dalam bentuk praktik pelaksanaan. Segala persoalan yang melawan adanya HAM harus segera diselesaikan dan penegak hukum harus mempunyai iktikad baik untuk bisa menjalankan hukum yang ada.

Sudah saatnya Indonesia menerapkan sistem demokrasi yang berkedaulatan rakyat, pemerintah semestinya sadar akan pentingnya konsep demokrasi yang mengutamakan rakyat, menumbukan rasa kebangsaan yang dihadirkan bukan hanya untuk pemersatu namun guna memberikan perlawanan atas ketidakadilan pemerintah yang menyimpang dan dari intervensi asing, bersama HAM yang harus tetap dijunjung tinggi sehingga tercipta masyarakat sesuai dengan sila-sila Pancasila. Konsep pemikiran Hatta merupakan jalan terang yang sesuai dengan jati diri bangsa Indonesia, Hatta memang belum membuktikan buah dari pemikirannya dengan sebab ia tidak diberi kesempatan untuk membuktikan konsep dari pemikirannya, lantaran Hatta sudah bukan menjadi seorang yang dapat mengambil kebijakan ketika itu. Sebagai generasi penerus bangsa Indonesia pemikiran Mohammad Hatta tersebut sudah saatnya untuk diterapkan bukan hanya sekedar bahan renungan yang pada akhirnya beralahan-lahan menghilang.

B. Rekomendasi

1. Ide-ide dari pemikiran Mohammad Hatta yang sudah penulis uraikan mengenai demokrasi, nasionalisme, dan HAM tidak cukup hanya sebatas dalam kajian semata, melainkan pemikiran tersebut seharusnya bisa dan mulai diterapkan dalam praktik kenegaraan di Indonesia. Khususnya oleh para penerus bangsa untuk dapat melanjutkan dan mewujudkannya di masa yang akan datang. Sehingga ide-ide beliau bisa berguna dan mempunyai kebermanfaatan bagi kehidupan berbangsa dan bernegara.
2. Pemerintah dan masyarakat harus bekerja sama demi terciptanya kedaulatan rakyat dengan memunculkan kematangan demokrasi. Sehingga tercipta masyarakat madani yang sebenarnya.
3. Rasa Nasionalisme atau kebangsaan mulai dipupuk kembali untuk menjaga keharmonisan dan perkembangan negara. Bersama pemerintah nasionalisme menjadi agenda pada setiap permasalahan baik dari dalam dan luar.
4. Partai politik yang mempunyai sumbangsih yang besar sebagai aktualisasi negara demokrasi. Fungsi partai politik yaitu pendidikan politik harus dijalankan sesuai dengan amanat undang-undang.
5. Indonesia sebagai negara hukum, HAM harus dijunjung tinggi serta diselaraskan dengan konstitusi yang berlaku. Pemerintah harus tegas dalam menyelesaikan persoalan HAM baik di masa lalu maupun kasus

pelanggaran HAM yang terjadi di kemudian hari. Sehingga segala bentuk permasalahan HAM dapat diselesaikan dengan baik.

6. Perlu diperbaiki kelemahan-kelemahan dalam mengimplementasikan demokrasi, nasionalisme dan HAM di Indonesia. Untuk peneliti yang selanjutnya, peneliti dapat membandingkan atau mengkombinasikan hasil dari pemikiran politik Mohammad Hatta baik itu mengenai pemikiran Hatta secara umum atau secara khusus dengan pemikiran tokoh politik di Indonesia sebagai contoh pemikiran politik Natsir, Tan Malaka, Sukarno dll. Diperlukan sebuah topik atau kajian seperti fungsi partai politik, kebebasan pers, terwujudnya masyarakat madani seutuhnya, desentralisasi, konstitusi Indonesia, intervensi UU oleh asing serta penegakan HAM. Karena itu menjadi menarik, sehingga bisa ditemukan kesimpulan jalan keluarnya.